

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Efektivitas

###### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau bisa juga dikatakan sebagai ukuran sejauh mana tingkat hasil, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berkaitan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sebuah perusahaan sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan memberikan pelayanan publik dengan baik. efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Agusti & Mahmuda, 2021, p. 70).

Seperti halnya dalam Syari'ah Islam, bekerja merupakan satu kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat 105 yang artinya sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah:105)

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan surat At-Taubah ayat 105 sebagai berikut: Allah SWT dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihat sebuah perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu. Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui lahir dan batin. Semua akan diberikan ganjaran atas perbuatan, Allah SWT memberi tahu segala hal yang kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama di dunia.

Efektifitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Pengertian efektifitas sebagai hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Efektivitas merupakan ukuran mengenai seberapa baik pekerjaan dapat dikerjakan dan sejauh mana seseorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas sistem didasarkan pada kontribusinya dalam pembuatan keputusan, kualitas informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian internal yang memfasilitasi transaksi perusahaan. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah dengan cara mengelompokkan tanggung jawab dan menggariskan secara jelas hubungan satu bagian dengan bagian lainnya dalam perusahaan, disertai dengan pertanggungjawaban dari masing-masing tingkatan secara terinci (Kemuning, 2018, p. 5)

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Efektivitas dapat dipahami sebagai

tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan suatu perusahaan. Efektivitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari *output* yang dihasilkan. Pencapaian efektivitas perusahaan dapat dilihat dari saling terkaitnya unsur-unsur utama dari sistem organisasi, bagaimana unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, memberikan kemudahan atau malah sebaliknya menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya dalam mendukung kegiatan operasional (Rahmadhani, 2018, p. 26).

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mulutnya, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas sistem dinilai berdasarkan kontribusinya dalam proses pembuatan keputusan, kualitas informasi akuntansi, evaluasi kinerja, pengendalian internal dan memfasilitasi transaksi perusahaan. Efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator:

- 1) Kejelasan startegi pencapaian tujuan program dan perumusan kebijakan program yang mantap
- 2) penyusunan program yang tepat
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana
- 4) Efektivitas operasional program
- 5) Efektivitas fungsional program
- 6) Efektivitas tujuan program dan sasaran program
- 7) Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakanprogram
- 8) Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program (Sutra & Prabawa, 2020, p. 21).

Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktivitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai yang dikehendaki (Juliati, 2018, p. 14).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan definisi-definisi efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau kegiatan lainnya (Salahudin et al., 2020, p. 197).

#### **b. Pendekatan Terhadap Efektivitas**

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah *input* menjadi *output* atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya.

1) Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merelalisasikan sasaran yang hendak di capai. Pendekatan sasaran dalam penguykuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur kegiatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam suatu pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan

memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sudah sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

- 2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*) Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini lebih didasarkan kepada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan tersebut diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi.
- 3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*) Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. (Kemuning, 2018, p. 6).

### c. Masalah Dalam Pengukuran Efektivitas

Efektifitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba, seperti ada beberapa rancangan tentang memandang konsep ini dalam kerangka kerja dimensi satu, yang memusatkan perhatian hanya kepada satu kriteria evaluasi (contoh produktivitas). Pengukuran efektifitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya dan memberikan hasil daripada pengukuran efektifitas berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal berikut:

### 1. Adanya Macam-Macam Output

Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektifitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan. Pengukuran juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya. Efektifitas tidak akan dapat diukur hanya dengan menggunakan satu indicator atau efektifitas yang tinggi pada suatu sasaran yang seringkali disertakan dengan efektifitas yang rendah pada sasarnya. Selain itu, masalah itu juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam suatu lembaga yang mempunyai sasaran yang berbeda –beda secara keseluruhan, sehingga pengukuran efektifitas seringkali terpaksa dilakukan. Dengan memperhatikan bermacam-macam secara simultan. Dengan demikian, yang diperoleh dari pengukuran efektifitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektifitas pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain sering dipermasalahkan adalah efkuensi penggunaan kriteria dalam pengukuran efektifitas oleh yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pengukuran efektifitas adalah:

- 1) Adaptabilitas dan Fleksibilitas
  - 2) Produktifitas
  - 3) Keberhasilan
  - 4) Keterbukaan dan berkomunikasi
  - 5) Keberhasilan pencapaian program
  - 6) Pengembangan program
- ### 2. Subjektif Dalam Adanya Penelitian

Pengukuran efektifitas dengan menggunakan pendekatan sasaran seringkali mengalami hambatan, karena sulitnya ,mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapi sasaran. Perlu masuk kedalam suatu lembaga untuk mempelajari sasaran yang sebenarnya karena informasi yang diperoleh hanya dari dalam suaru lembaga untuk melihat program yang berorientasi ke luar atau masyarakat seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas. Untuk

sasaran yang dinyatakan bahwa bentuk kuantitatif, unsur subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh akan sangat tergantung pada subjektifitas dalam suatu lembaga mengenai sarasannya. lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen konsektual terhadap informasi lembaga dan membentuk tercapai tidaknya sasaran yang hendak dicapai.

## **2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

### **a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Pemahaman akuntansi adalah “kemampuan untuk menangkap baik pentingnya maupun signifikansi dari praktik pembukuan itu sendiri. Pemahaman tentang pembukuan yang terkait dengan perincian keuangan sangat penting. Pemahaman pembukuan yang baik diandalkan untuk memberikan keuntungan bagi kemajuan dan perkembangan suatu usaha. Seseorang dikatakan memiliki pemahaman akuntansi apabila memahami transaksi akuntansi, membuat dan memahami laporan keuangan sesuai standar akuntansi, dan mampu mencatat serta mendokumentasikan bukti transaksi”. Dokumen-dokumen transaksi merupakan tahap awal dari siklus akuntansi. Semua pencatatan harus ada bukti yang jelas sebagai sumber bukti pencatatan selama proses penyusunan laporan keuangan yang berasal dari internal (pihak perusahaan yang menyusun laporan keuangan) maupun dari eksternal (pihak luar yang berhubungan dengan transaksi dan dokumen). menyatakan bahwa informasi adalah data-data yang telah diproses dengan cara-cara tertentu sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi yang digunakan dalam perusahaan dibagi menjadi informasi kuantitatif dan informasi non kuantitatif. (Fitriani et al., 2023)

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer.



Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa system pencatatan yang dapat digunakan. Sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu *Single Entry*, *Double Entry* dan *Triple Entry* (Br Purba & Mendina Amrul, 2018, p. 3).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Husna, 2022, p. 209).

Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Tidak ada standard akuntansi khusus terkait dengan kas namun secara umum dibahas dalam standard tentang instrument keuangan



Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Good Governance* salah satunya adalah menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi”. Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya (Nasution & M.Si, 2021, p. 111).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Permendagri No.64 Tahun 2013, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi serta pelaporan

keuangan dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam menjalankan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdapat beberapa indikator yang menjadi prosedur dalam menjalankan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dari proses input hingga output agar berfungsi dengan baik, yaitu: 1) Basis Akuntansi sebagai suatu kegiatan pada transaksi yang dilakukan dari pencatatan hingga pelaporan laporan keuangan; 2) Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran. Mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan pada sumber dan alokasi dana pemerintahan selama periode tersebut; 3) Penyusunan APBD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah berkenaan uang dan barang harus dianggarkan dalam APBD; dan 4) Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PP 12 Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan keuangan Aksesibilitas (Zeny Antika et al., 2020, p. 218).

Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh *Accounting Principle Board (APB)* yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut: “Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan”.

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal), juga oleh pihak di luar Pemda

(eksternal), seperti DPRD, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI “Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan” (Erni et al., 2018, p. 135).

Pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan secara sederhana melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah didefinisikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia (R. D. Harahap, 2020, p. 7).

Karyawan dengan semangat kerja yang rendah, loyalitas yang goyah, dan kinerja yang buruk mungkin berasal dari ketidakmampuan perusahaan untuk menawarkan remunerasi yang layak dan kepuasan karyawan. Perusahaan yang gagal melakukannya akan lebih rentan terhadap guncangan. Akibatnya, lingkungan kerja dan layanan perusahaan mungkin

menjadi tidak stabil akibat protes dan demonstrasi karyawan (A. S. Harahap et al., 2022, p. 190)

#### **b. Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Asset/ Barang Milik Negara**

Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan pada Permendagri no 17 tahun 2007 pasal 4 pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Hal ini meliputi :

- 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- 2) Pengadaan
- 3) Penerimaan penyimpanan dan penyaluran
- 4) Penggunaan
- 5) Penatausahaan
- 6) Pemanfaatan
- 7) Pengamanan dan pemeliharaan
- 8) Penilaian
- 9) Penghapusan
- 10) Pemindahtanganan
- 11) Pembinaan pengawasan dan pengendalian
- 12) Pembiayaan
- 13) Tuntutan ganti rugi

Sistem akuntansi pemerintah daerah di laksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

- 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
- 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
- 3) Prosedur Akuntansi Asset Tetap/Barang Milik negara
- 4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur atau tahap pelaporan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 antara lain:

- 1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola
- 3) Membantu pengelola menghimpung laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) menjadi Laporan Brang Milik Negara (LBMD) (Kemuning, 2018).

### **c. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standards Board (IASB)* yang sekarang disebut dengan *International Financial Reporting Standar (IFRS)* sebagai syarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik. Oleh karena itu anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah merupakan pelayan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peran penting dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat merupakan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah. Dengan demikian pemerintah ataupun pemerintah daerah harus dapat merencanakan dan menyelenggarakan program-program kerja yang tujuan akhirnya adalah menciptakan kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Selain itu hal yang mendasar dan dianggap penting dalam penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah

sistem akuntansi. Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian jika sistem keuangan daerah diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik. Sistem akuntansi keuangan daerah erat kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada periode tertentu untuk mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan jadi lebih baik dan berkualitas (Defitri, 2018, p. 68).

Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Sedangkan dalam permendagri No. 13 Tahun 2006 diungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (Dasmaran et al., 2018, p. 172).

#### **d. Karakteristik Akuntansi Pemerintah**

Berdasarkan fungsinya, akuntansi pemerintahan memang secara khusus bagi lembaga negara yang mana tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 1) Akuntansi pemerintahan ini berorientasi pada pelayanan publik dan bukan laba. Maka dari itu, dalam laporan keuangannya tidak terdapat laporan laba (*income statement*) dan laporan akuntansi yang berkaitan dengan itu.
- 2) Melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut terbukukan.
- 3) Akuntansi pemerintahan juga memungkinkan penggunaannya lebih dari satu dana.
- 4) Menggunakan perkiraan laba dan modal yang tertahan di neraca.
- 5) Akuntansi ini bersifat kaku dan bergantung pada peraturan undang-undang yang berlaku.



Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis atau perusahaan. Beberapa karakteristik akuntansi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1) Tidak Berorientasi Laba

Lembaga pemerintah seperti kementerian biasanya tidak mencatat laba (*profit*) negara karena pendapatan secara keseluruhan didapat dari pemasukan negara yang bersifat memaksa berupa pajak atau pendapatan lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Kepemilikan pemerintah bersifat kolektif oleh konstituen

Artinya kepemilikan pemerintah tidak mudah dialihkan. Harus melalui mekanisme yang panjang untuk memberi masukan kepada pemerintah jika tidak puas dengan kinerjanya.

3) Kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan

Artinya tidak hanya yang membayar pajak banyak saja yang menikmati fasilitas, namun semua rakyat Indonesia bisa menikmatinya.

4) Keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh Lembaga perwakilan negara

Memiliki berbagai macam latar belakang Pendidikan namun dipaksa oleh berbagai pihak untuk memutuskan berbagai persoalan yang kerap Tidak sesuai dengan keahlian.

5) Keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka

Pencatat akuntansi pemerintah dan laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan harus bersifat terbuka, agar **S**iapapun dapat melihat dan memeriksa untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

6) Pemakaian lebih dari satu jenis dana

Pemakaian dana untuk suatu kegiatan atau program pemerintah berasal dari berbagai sumber, karena memiliki banyak sumber pendapatan.

7) Akuntansi pemerintah bersifat kaku

Akuntansi pemerintah sangat bergantung dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemakaiannya bersifat kaku atau tidak bisa ditambah atau dikurangi dengan apapun.

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berikut ini karakteristik akuntansi pemerintahan.

- 1) Berbeda dengan akuntansi bisnis
  - 2) Tidak ada laporan laba
  - 3) Anggaran merupakan *plafond*
  - 4) Menggunakan lebih dari satu dana
  - 5) Sangat bergantung pada undang-undang
  - 6) Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca
- (Reza & Susanti, 2022, p. 16).

#### **e. Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konstitusi atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, adanya perbedaan perlakuan pemerintahan dengan akuntansi bisnis dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya. Meskipun tujuan kedua organisasi berbeda tetapi pada hakikatnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis sama yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu. Berkaitan dengan itu, akuntansi pemerintahan secara khusus memiliki tujuan berikut:

##### 1) Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis.

##### 2) Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi mana-jerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.

### 3) Pengawasan

Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI (R. Anggraini et al., 2018, p. 342).

## 3. Prosedur Akuntansi

### a. Prosedur-prosedur Akuntansi

#### 1) Prosedur-prosedur Akuntansi

- a) Prosedur akuntansi pendapatan, yaitu serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan penyetorannya, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b) Prosedur akuntansi belanja, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja. Prosedur akuntansi belanja di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi belanja dengan UP/GU, prosedur akuntansi belanja dengan TU, dan prosedur akuntansi belanja Ls.
- c) Prosedur akuntansi aset, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi asset lainnya. Prosedur akuntansi aset tetap merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar belanja modal yang telah dikeluarkan dapat dicatat dan dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Prosedur akuntansi asset lainnya

merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar transaksi-transaksi terkait dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya dapat dibukukan dan dilaporkan di neraca secara seragam.

- d) Prosedur akuntansi non kas. Transaksi non kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya transaksi kas.

### **b. Prosedur Akuntansi Aset**

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

#### **1. Fungsi Terkait**

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

#### **2. Dokumen yang digunakan**

a. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset pada SKPKD terdiri atas:

- 1) Berita acara penerimaan barang.
- 2) Berita acara serah terima barang.
- 3) Berita acara penyelesaian pekerjaan.
- 4) Bukti memorial, merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset

tetap, nilai aset tetap, dan tanggal transaksi dan/atau kejadian sebagai dasar pencatatan kedalam buku jurnal umum.

- 5) Buku jurnal umum, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan aset.
  - 6) Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD untuk memosting semua transaksi atau kejadian dari buku jurnal umum ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - 7) Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD atau fungsi akuntansi pada SKPKD untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.
- b. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset pada SKPKD terdiri atas:
- 1) Berita acara penerimaan barang.
  - 2) Surat keputusan penghapusan barang.
  - 3) Surat keputusan mutasi barang (antar-SKPD).
  - 4) Berita acara pemusnahan barang.
  - 5) Berita acara serah terima barang.
  - 6) Berita acara penilaian
  - 7) Berita acara penyelesaian pekerjaan.
  - 8) Bukti memorial, merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai jenis/ nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, dan tanggal transaksi atau kejadian sebagai dasar pencatatan kedalam buku jurnal umum.
  - 9) Buku jurnal umum, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD untuk mencatat dan

menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan aset.

10) Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD untuk memosting semua transaksi atau kejadian dari buku jurnal umum ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

11) Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD atau fungsi akuntansi pada SKPKD untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.

### 3. Laporan yang dihasilkan

a. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

b. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

### 4. Uraian prosedur

a. Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD serta pejabat, perngurus, dan penyimpan barang sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

b. Bukti transaksi atau kejadian akuntansi aset terdiri atas:

- 1) Berita acara penerimaan barang.
- 2) Surat keputusan penghapusan barang.

- 3) Surat pengiriman barang.
  - 4) Surat keputusan mutasi barang.
  - 5) Berita acara pemusnahan barang.
  - 6) Berita acara serah terima barang.
  - 7) Berita acara penilaian.
  - 8) Berita acara penyelesaian pekerjaan.
- c. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial.
  - d. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memoriat mencatat ke dalam buku jurnal umum.
  - e. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar.
  - f. Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dan SKPKD (MBA Akt, 2018).

### **c. Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan SKPKD.

Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi dan kejadian yang berupa:

- 1) Pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana yang merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ ganti uang tambahan.
- 2) Koreksi kesalahan pencatatan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar.



- 3) Penerimaan hibah selain kas yang merupakan penerimaan sumber ekonomi non kas yang bukan merupakan pelaksanaa APBD, tetapi mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemda.
- 4) Pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang.
- 5) Retur pembelian kredit yang merupakan pengembalian aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan pemindahtanganan aset tetap kepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas
- 6) Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (*ruilslaag*) dengan pihak ketiga (MBA Akt, 2018, p. 86).

#### 4. Aset Tetap

##### a. Pengertian Aset

Aset tetap adalah aset yang tidak dapat diubah menjadi uang tunai selama siklus operasi bisnis. Dan yang termasuk dalam aset modal adalah sebuah bangunan, peralatan, dan tanah atau properti berwujud yang digunakan dalam bisnis, tetapi tidak diharapkan atau diharapkan untuk digunakan atau diklaim untuk uang dalam menjalankan bisnis tersebut. biasanya, biasa, normal (T. Anggraini & Syafina, 2022, p. 343).

Aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari aktiva tersebut diharapkan ada manfaat ekonomi masa depan yang mengalir kedalam entitas pada masa yang akan datang. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang (*Future Economic Benefit*). Karakter utama dari aktiva adalah memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Aktiva tetap merupakan harta milik perusahaan yang memiliki wujud fisik, diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual serta membenarkan manfaat ekonomi untuk periode jangka panjang, dan merupakan subjek depresiasi/penyusutan (Yusuf et al., 2021, p. 40).

Aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen dan merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual, yang digunakan untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah. Aktiva tetap merupakan barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual belikan. aset tetap adalah aset yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi dan ditinjau dari lama perputaran aset tetap ialah aset yang mengalami proses perputaran dalam jangka waktu Panjang (Mayangsari & Nurjanah, 2018, p. 197).

Aktiva tetap (*fixed assets*) adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan, atau untuk keperluan administrasi; dan harapan dapat digunakan lebih dari satu periode. Aktiva tetap adalah aktiva-aktiva dengan sifat yang tidak bisa dikonversikan menjadi uang tunai dalam siklus operasi perusahaan. Termasuk didalamnya adalah bangunan, peralatan dan tanah atau property berwujud yang digunakan dalam suatu bisnis, tetapi tidak diharapkan untuk digunakan habis atau dikonfirmasi menjadi dana tunai dalam perjalanan bisnis biasa (V. M. M. Siregar, 2018, p. 251).

Penggunaan aset tetap yang efisien menentukan kinerja entitas. Pada saat entitas menambah modalnya dalam bentuk utang, aset tetap sangat diperhatikan dalam menentukan kelayakan dan jumlah kredit yang akan diberikan, karena aset tetap digunakan sebagai jaminan kredit. Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan

menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi dan Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi, sedangkan jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Menurut PSAK 16, penurunan nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi (Meiliana & Febriyanti, 2022, p. 74).

Aset menurut PSAP No.1 tahun 2010 mengartikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dengan makna yang sama *International Accounting Standard Committee (IASC)* mengatakan bahwa aset sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil kejadian masa lalu yang mana manfaat ekonomis masa depan diharapkan didapatkan oleh perusahaan. *Dalam statement of Accounting Concepts No. 4, Australian Accounting Standard Board (AASB)* mendefinisikan aset sebagai sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu. Sedangkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Lampiran II PP No 24 tahun 2005) mendefinisikan asset lebih luas lagi, yaitu sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan

atau dimiliki oleh suatu pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan daripadanya diperoleh manfaat ekonomi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya Milik Daerah. Definisi dari Barang Milik Daerah itu sendiri menurut Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah “Semua barang yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah (Labasido & Darwanis, 2019, p. 218).

Aset tetap memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya bukanlah hal yang mudah karena sering kali terdapat berbagai persoalan aset. Salah satu penyebab tidak maksimalnya opini yang diberikan oleh BPK adalah rendahnya akurasi data aset. Oleh sebab itu, penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan aset tetap yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 (Lubis & Hasibuan, 2022).

#### **b. Konsep Aset Tetap**

Aset tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menggunakan istilah aset tetap dengan *General Capital Asset*. Aset modal meliputi tanah, perbaikan tanah, kemudahan bangunan, perbaikan bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, karya seni dan harta karun sejarah, infrastruktur, dan semua aset berwujud lainnya yang digunakan dalam operasi dan memiliki masa

manfaat yang melebihi periode pelaporan tunggal (Sengkey et al., 2022, p. 443).

### c. Nilai Penyusutan Aset

Penyusutan adalah pengurangan nilai kegunaan aset tetap karena pemakaian, usia, dan sebagainya, yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan perusahaan. Faktor yang menyebabkan penyusutan pada aset tetap yaitu :

- 1) Faktor Fisik Beberapa faktor yang mengurangi fungsi aktiva tetap adalah aus karena digunakan (*wear and tear*), aus karena umur (*deterioration and decay*) dan kerusakan-kerusakan.
- 2) Faktor Fungsional Ada beberapa faktor yang membatasi umur aktiva tetap yaitu : ketidakmampuan aset tetap untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu digant dan karena adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktiva tersebut tidak ekonomis lagi jika dipakai.

Penyusutan aset tetap adalah pengalokasian nilai aset yang dihitung pertahun dan dijadikan pengurang nilai aset tetap dari saat perolehan. Faktor yang dibutuhkan untuk menentukan nilai penyusutan aset yaitu:

- 1) Harga Perolehan (*Acquisition Cost*)

Harga Perolehan yaitu harga beli aset ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sejak proses pembelian hingga aset tersebut siap digunakan.

- 2) Nilai Sisa (*Salvage Value*)

Nilai Sisa adalah taksiran nilai uang yang akan diterima jika aset tersebut dijual setelah masa manfaatnya berakhir.

- 3) Umur ekonomis (*Economic Life Time*)

Umur Ekonomis atau Masa Manfaat adalah perkiraan jangka waktu pemakaian aset. Jangka waktu bisa dalam periode tahun, waktu, jumlah hari maupun total jam kerja (Susanto, 2019, p. 12).

### d. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP No. 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaL Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

2) Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnyayang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup semua gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum. Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa

*mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing- masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut :

- a. Gedung
- b. Bangunan Fisik
- c. Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar
- d. Instalasi AC
- e. Instalasi Listrik dan Generator
- f. Lift
- g. Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah
- h. Saluran Telepon

Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga; 1 setidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai 2 umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen 3 penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

#### 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi misalnya jalan, jembatan,



waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi gas, jaringan telepon, dan sebagainya. Klasifikasi yang tepat akan menyederhanakan penetapan kebijakan pemeliharaan/perawatan maupun kebijakan penyusutan aset bersangkutan (Dwitayanti & Zahara, 2019, pp. 86–88).

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian di Google Scholar ditemukan 500 Judul yang terkait namun saya hanya meneliti dari tahun 2019-2023 ditemukan sebanyak 200 judul penelitian terkait dan dari penelitian tersebut saya hanya mengambil 10 penelitian, berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wa Ode Diana Agusti (2021)	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton	Kualitatif	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton untuk sistem dan prosedurnya dikatakan telah sesuai dengan Pemendagri No. 19 Tahun 2016, meskipun pada tahapan penilaian masih belum optimal waktu pelaksanaannya karena untuk semua daerah Kabupaten dan Kota masih bergantung dengan tim penilai dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di Kendari, namun BKAD

				Kabupaten Buton tetap melakukan kegiatan penilaian setiap tahunnya.
2	Arif Maulana Yusuf (2021)	Sistem Informasi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus Berbasis Vb.Net Pada Cv Ginanjar Sejahtera Mandiri Karawang	Kualitatif	Berdasarkan hasil observasi pada penelitian ini sudah melakukan pengembangan prosedur pembelian aktiva tetap pada CV Ginanjar Sejahtera Mandiri. sudah melakukan pengembangan terhadap identifikasi perhitungan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus untuk memudahkan perusahaan dalam membuat laporan penyusutan aktiva tetap.
3	Yusril Mahendra Pasaribu (2021)	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Asahan	Kualitatif	Penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Asahan telah dilakukan dengan efektif dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang pengelola keuangan dan aset daerah yang berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016. Akan tetapi dalam pengelolaan aset tetap tersebut masih Terdapat beberapa hambatan yang berasal dari sikap dan persepsi aparatur daerah yang menganggap pengelolaan aset sebagai hal yang tidak memiliki

				pengaruh penting dibandingkan pengelolaan keuangan daerah.
4	Heriyanto (2022)	Efektivitas Penerapan System Dan Prosedur Akuntansi Asset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Metro.	Kualitatif	Efektivitas Penerapan System Dan Prosedur Akuntansi Asset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Metro sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari Sistem dan prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran,serta perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan penerimaan sesuai dengan prosedur kemudian barang yang diterima disimpan ditempat penyimpanan sebelum barang disalurkan kepada unitunit organisasi. Sistem dan prosedur Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dimana BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pengamanan secara administrasi dan fisik serta melakukan beberapa bentuk pemeliharaan yang disesuaikan dengan jenis barang

5	Tessa Anggraini, Laylan Syafina (2022)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada PT Prima Indonesia Logistik Berdasarkan PSAK No 16	Kualitatif	Penulis sampai pada kesimpulan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatannya akuntansi nya berdasarkan kebijakan akuntansi menghasilkan penerapan PSAK No. 16 tentang aset Tetap. Yang membedakan jenis aset tetap dan bentuk pembeliannya yaitu pembelian dengan tunai atau dengan konstruksi sendiri, objek penelitian ini adalah untuk mengurangi aset tetap dengan melakukan dekomisioning aset tetap dengan menghapus aset tetap. harta benda dari daftar harta benda dan melepaskannya dengan membuang atau memusnahkannya. Selain penyajian dan pengungkapan, perusahaan juga menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan mengungkapkan beberapa informasi dalam catatan atas laporan keuangan.
6	Levana Softari (2019)	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintahan Daerah Berdasarkan Sap Nomor 07 Tentang	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Secara keseluruhan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem telah berjalan, memudahkan pencatatan data aset dan menghasilkan laporan yang hanya dalam model jaringan tetap harus disiapkan sebagai

		Aset Tetap (Studi Kasus Pada Sekretariat Dprd Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi)		pendukung, dan efektivitas Prosedur Akuntansi aset tetap dalam laporan tersebut sesuai dengan SAP Nomor 07 tentang Aset Tetap dan juga berbasis akrual. Faktor penghambat adalah aset yang terkadang tidak diketahui.
7	Yevi Dwitayanti, Hafni Zahara (2019)	Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Bkkbn Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap	Kualitatif	<p>Pengakuan aset tetap pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyusutan atas aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.</p> <p>Penghentian dan Pelepasan aset tetap Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap karena hanya melakukan pencatatan aset tetap yang dihentikan secara permanen saja.</p>

				Padahal Standar Akuntansi Pemerintah juga mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan tidak didefinisikan sebagai aset tetap ke pos aset lainnya.
8	Arrandha Meida Lubis, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan (2022)	Evaluasi Pengelolaan Aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Kualitatif	Pengelolaan perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, serta penghapusan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. dimana Dinas Pendidikan Provinsi telah melakukan perencanaan sesuai kebutuhan. Sedangkan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan belum sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Hal itu disebabkan karena masih terdapat aset/barang yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan serta tidak melakukan bentuk-bentuk pemanfaatan atas aset yang dimiliki.
9	Sarmiati (2020)	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Pt. Almira Lintang Pratama	Kualitatif	Penyajian laporan keuangan PT. Almira Lintang Pratama tidak efektif dan sesuai landasan teori yang terkait. Dalam hal ini peneliti mengemukakan tolak ukur efektifitas yaitu Kualitas informasi

			<p>yang disajikan tidak tepat waktu, relevan, andal dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penyajian yang disajikan dalam laporan tidak sesuai dengan nilai wajar dan prinsip akuntansi berlaku umum (PABU). Dalam sistem tanya jawab, waktu respon untuk penyajian tidak sesuai dengan kemampuan menjelaskan metode penyajian dan memaparkan informasi yang disajikan. Sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut belum dapat dikatakan efektif. Perusahaan tersebut telah menggunakan salah satu sistem akuntansi yaitu accurate. Sistem ini digunakan secara total pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, namun pada pencatatan seluruh aset tetap perusahaan ini belum di catat kedalam aplikasi accurate tersebut. Pencatatan aset tetap pada perusahaan ini mencatatnya melalui Microsoft exel. Sistem dan prosedur Aset Tetap pada PT. Almira Lintang Pratama belum sesuai dengan salah satu teori yang ada pada hasil penelitian ini terutama pada bagian pemeliharaan</p>
--	--	--	---



				Aset/ barang. Penerapan sistem dan prosedur belum bisa dikatakan efektif ketika salah satu diantara subsistem ada yang belum memenuhi prosedur yang ada atau belum sesuai dengan landasan teori yang ada.
10	Ilham Faried Arrahman Aituarauw (2021)	Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	Kulitatif	Sesuai peraturan yang berlaku, cara pengelolaan barang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga cakupan tadi diselenggarakan guna mengelola barang milik daerah supaya berjalan sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa keberadaan aturan yang pelaksanaannya dilakukan kepada penyelenggara pemerintah terkait menggunakan pelaksanaan wewenang pengelolaan barang milik daerah, dan tidak terdapat kerugian yang diterima kepada daerah saat pelaksanaan melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan kerugian daerah yang akibatnya muncul tuntutan ganti rugi, dan hukuman administratif /atau hukuman pidana. Agar tidak terjadi penyalahgunaan pada pengelolaan barang milik daerah

			<p>pada pelaksanaannya wajib sesuai pada peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Agar tidak terdapat kerugian yang diterima pemerintah pada daerah dan memperkecil implikasi berdasarkan penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah maka diberlakukan ganti rugi, dan hukuman administratif /atau hukuman pidana sama dengan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah maka diberlakukan ganti rugi, dan hukuman administratif /atau hukuman pidana sama dengan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>
--	--	--	--

1. Persamaan dan perbedaan penelitian (Wa Ode Diana Agusti (2021) dengan penelitian ini adalah:

- a. Persamaannya yaitu variable yang diteliti dan sama- sama menggunakan pendekatan kualitatif.
- b. Perbedaannya adalah terdapat pada tempat pengambilan sampel dan latar belakang masalah.

2. Persamaan dan Perbedaan penelitian (Arif Maulana Yusuf, 2021) dengan penelitian ini adalah:

- a. Persamaannya yaitu variable yang diteliti dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
- b. Perbedaannya yaitu terdapat pada pengambilan sampel.

3. Persamaan dan perbedaan penelitian (Yusril Mahendra Pasaribu, 2021) dengan penelitian ini adalah:
  - a. Persamaannya yaitu variable yang diteliti dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.
  - b. Perbedaannya pada tempat pengambilan sampel dan metode penelitian yang digunakan.
4. Persamaan dan perbedaan penelitian (Heriyanto, 2022) dengan penelitian ini adalah:
  - a. Persamaannya yaitu memiliki variable yang sama yaitu Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap.
  - b. Perbedaannya yaitu pada tempat pengambilan sampel dan metode penelitian yang digunakan.
5. Persamaan dan perbedaan penelitian (Tessa Anggraini, Laylan Syafina, 2022) dengan penelitian ini adalah:
  - a. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif.
  - b. Perbedaannya yaitu membahas variable yang berbeda yaitu analisis perlakuan akuntansi aset tetap dan tempat pengambilan sampelnya yang berbeda.
6. Persamaan dan perbedaan penelitian (Levana Softari, 2019) dengan penelitian ini adalah:
  - a. Persamaannya yaitu memiliki variable yang sama dan metode penelitian yang sama.
  - b. Perbedaannya yaitu pada tempat pengambilan sampel.
7. Persamaan dan perbedaan penelitian (Yevi Dwitayanti, Hafni Zahara, 2019) dengan penelitian ini adalah:
  - a. Persamaannya yaitu memiliki metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.
  - b. Perbedaannya yaitu membahas variable yang berbeda yaitu tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan tempat pengambilan sampel yang berbeda.

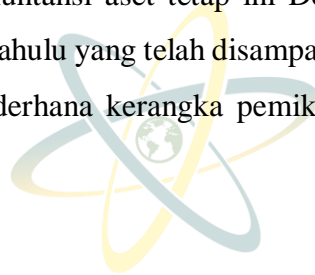
8. Persamaan dan perbedaan penelitian (Arrandha Meida Lubis, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, 2022) dengan penelitian ini adalah:
  - a. Persamaannya terdapat pada metode penelitian yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif.
  - b. Perbedaannya yaitu pada tempat pengambilan sampel dan variable yang berbeda.
9. Persamaan dan perbedaan penelitian (Sarmiati, 2020) dengan penelitian ini adalah:
  - a. Persamaannya yaitu memiliki persamaan Variable X tentang Efektivitas Penerapan sistem dan prosedur dan variable Y tentang Akuntansi Aset tetap
  - b. Perbedaannya yaitu pada tempat pengambilan sampel, metode penelitian yang berbeda.
10. Persamaan dan perbedaan penelitian (Ilham Faried Arrahman Aituarauw, 2021) dengan penelitian ini adalah:
  - a. Persamaannya terdapat pada metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif
  - b. Perbedaannya yaitu pada tempat pengambilan sampel dan metode penelitian yang digunakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Astri Kemuning (2020) persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Astri Kemuning adalah pada variable yang diteliti yaitu efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap. Kemudian perbedaan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sri Astri Kemuning adalah terdapat yang melatarbelakangi masalah yaitu tentang pengelolaan aset tetap yang belum efektif sedangkan pada penelitian ini, terdapat yang melatarbelakangi masalah yaitu belum memiliki bangunan tetap.

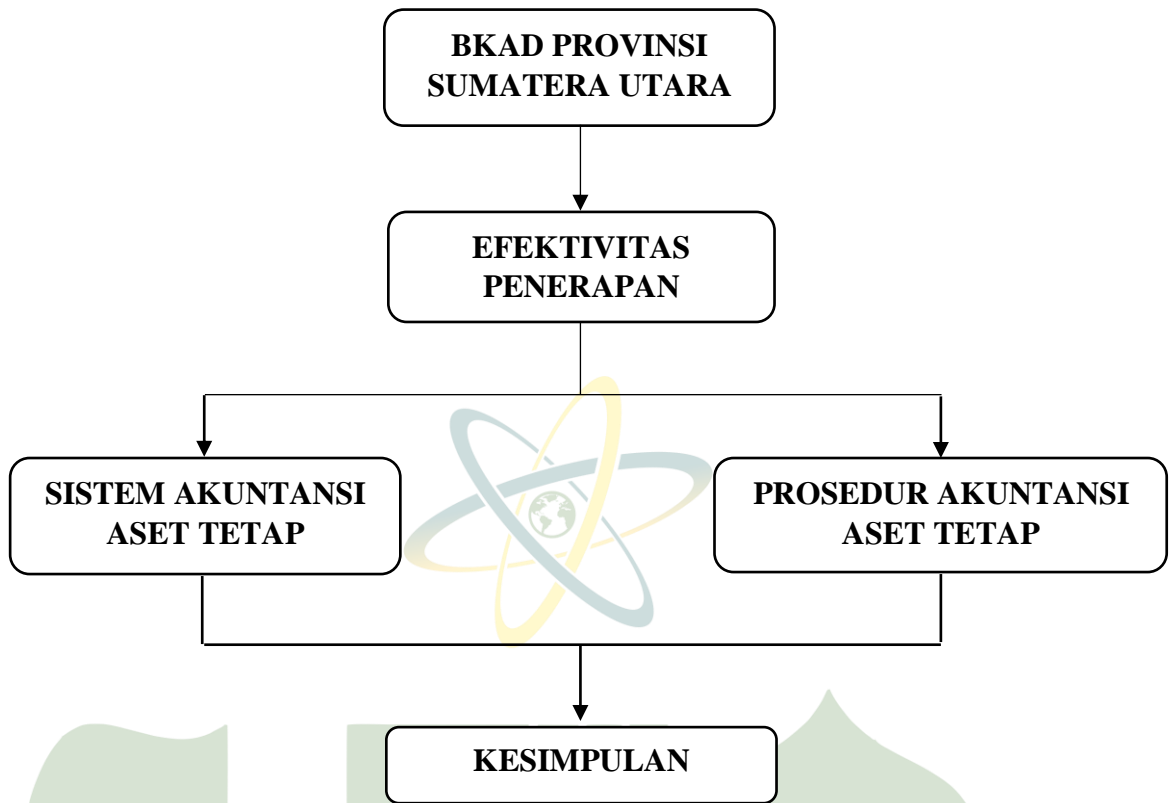
### **C. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Badan Keuangan Dan

Aset Daerah (BKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset dipimpin oleh kepala dinas dan kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. BKAD ini sangat berpengaruh dengan sistem informasi akuntansi aset tetap ini dikarenakan untuk mengetahui sistem kinerja yang dilakukan BKAD Provinsi Sumatera Utara ini sudah memenuhi syarat yang telah diterapkan sebelumnya guna untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap ini Dengan melihat landasan teori beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan secara sederhana kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis